



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 279/KEP/BPP/2022
TENTANG

PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
TAHUN 2022

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati Padang Pariaman Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

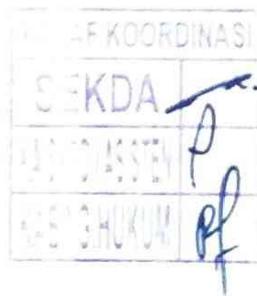


7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 56 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati Padang Pariaman Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa melaksanakan penyusunan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 14 Juli 2022
BUPATI PADANG PARIAMAN,



A handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Suhatri Bur', is written over the text 'BUPATI PADANG PARIAMAN,'.

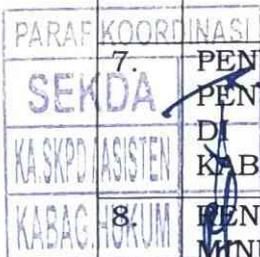
SUHATRI BUR

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
3. Sdr. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 279/KEP/BPP/2022
TANGGAL 14 JULI 2022
TENTANG
PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN
BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2022

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN BUPATI	OPD PEMRAKARSA
1.	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN	SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN ORGANISASI)
2.	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DAN PERJALANAN DINAS	BPKD
3.	PENEGAKAN DISIPLIN DAN TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN	BKPSDM
4.	HARI KERJA, JAM KERJA DAN KEGIATAN RUTIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN	BKPSDM
5.	TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN	BKPSDM
6.	TENAGA AHLI BUPATI	SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KERJA SAMA)
7.	PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN	DINAS KOMINFO
8.	RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2040	DINAS PUPR
9.	RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PEKOTAAN KAYU TANAM TAHUN 2022-2040	DINAS PUPR
10.	PEDOMAN PENGGUNAAN EMAIL DINAS	DINAS KOMINFO
11.	PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG	DISDAGNAKERKOP DAN UKM
12.	KODE ETIK UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN PADANG PARIAMAN	SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA)



13.	RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025	BPBD
14.	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022	BPKD
15.	FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN	KESBANGPOL
16.	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022	BPKD
17.	TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022	BPKD
18.	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG TAMABAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN	BKPSDM
19.	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG TAMABAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN	BKPSDM
20.	UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN PADANG PARIAMAN	SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN PENGADAAN BRANG/JASA)
21.	ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2026	SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN ORGANISASI)
22.	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN ORGANISASI)
23.	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN ORGANISASI)
24.	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 60 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN	SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN ORGANISASI)
25.	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA	SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN ORGANISASI)

PARAF
 SEKDA
 KASAKD
 KASOTEN
 KABAG HUKUM

	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
26.	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 64 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN ORGANISASI)
27.	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 65 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN ORGANISASI)
29.	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN ORGANISASI)
30.	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 70 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN ORGANISASI)
31.	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 73 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN ORGANISASI)
32.	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 74 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTENAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN ORGANISASI)
33.	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 75 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN ORGANISASI)
34.	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022	BPKD
35.	PEDOMAN REVIU PELAKSANAAN PERANCANAAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022	INSPEKTORAT
36.	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG	BPKD

PARAF KOORDINASI
SEKDA
 KA.SKPD/ASISTEN
 KABUPATEN

	STANDAR BIAYA UMUM DAN PERJALANAN DINAS	
37.	RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023	BAPELITBANGDA
38.	PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021	BPKD
39.	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN	DISDIKBUD
40.	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022	BAPELITBANGDA
41.	TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH	BPKD
42.	PETUNJUK TEKNIS IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN	BPKD
43.	PENYELENGGARAAN SATU DATA KABUPATEN PADANG PARIAMAN	DISDUKCAPIL
44.	TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	BPKD
45.	AREA POTENSI PERUNTUKAN USAHA TAMBAK UDANG DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN	DPMPTP
46.	TARIF LAYANAN KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
47.	PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN OLEH PENGEMBANG DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN	DLHPKPP
48.	PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI	DLHPKPP
49.	RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PASAR USANG TAHUN 2022-2042	DINAS PUPR
50.	PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT	DINAS KESEHATAN
51.	STRATEGI PERUBAHAN PERILAKU DALAM UPAYA PERCEPATAN PENURUNAN DAN PENCEGAHAN STUNTING	DINAS KESEHATAN
52.	PENGELOLAAN ASET NAGARI	DPMD
53.	PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA NAGARI SETIAP NAGARI DI	DPMD



	KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2023	
54.	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA NAGARI	DPMD
55.	PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN 2023	DPMD
56.	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENYALURAN PENGHASILAN TETAP WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI	DPMD
57.	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM NAGARI DAN BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN NAGARI	DPMD
58.	SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	BPKD
59.	SISTEM AKUNTANSI	BPKD
60.	KEBIJAKAN AKUNTANSI	BPKD



BUPATI PADANG PARIAMAN,



SUHATRI BUR